



**PERPUSTAKAAN NASIONAL**  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 183/2/PPM.00.00/1.2021  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Usulan Perpustakaan Desa Penerima Manfaat Program  
Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Jakarta, 13 Januari 2021

Kepada  
Yth **Bupati Banggai Kepulauan**  
Di Jl. Imam Bonjol, Banggai Kepulauan  
Sulawesi Tengah

Dengan hormat,

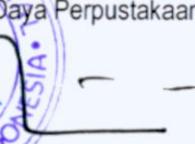
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan amanat Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan di mana Perpustakaan ditetapkan sebagai urusan wajib non pelayanan dasar untuk menyediakan layanan yang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan masyarakat, Perpustakaan Nasional RI pada tahun 2021 akan menyelenggarakan Kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan hal-hal berikut:

1. Kegiatan ini memiliki tujuan memperkuat peran perpustakaan umum dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui peningkatan kemampuan literasi yang meningkatkan kreativitas masyarakat dan mengurangi kemiskinan akses informasi.
2. Kegiatan ini memberikan dukungan bantuan penguatan pelayanan perpustakaan berupa :
  - 1) Peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan dalam mengelola perpustakaan dengan melibatkan masyarakat melalui pelatihan, lokakarya, pertemuan pemangku kepentingan;
  - 2) Bantuan koleksi buku dan perangkat komputer untuk pelayanan perpustakaan,
  - 3) Monitoring dan evaluasi;
  - 4) Peningkatan layanan perpustakaan melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perpustakaan

Berkaitan dengan hal tersebut, Perpustakaan Nasional RI memberikan kesempatan untuk menyampaikan minimal 5 Perpustakaan Desa di wilayah kerja Saudara yang akan diusulkan sebagai calon penerima manfaat program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2021 sesuai kriteria terlampir, dan belum pernah menerima program tersebut.

Seluruh usulan yang masuk akan dilakukan seleksi dan ditetapkan SK Kepala Perpustakaan Nasional. Usulan Perpustakaan Desa calon penerima manfaat program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial paling lambat kami terima pada 29 Januari 2021, dan korespondensi kegiatan ini dapat menghubungi Ibu Sri Wulansari (Telp/Wa 081310200172), Ajeng (Telp/Wa 085640403434), melalui email transformasi.perpusnas@gmail.com atau dikirimkan ke Perpustakaan Nasional RI cq Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus, Gedung B Lt. 6 Jl. Salemba Raya No. 28A Jakarta Pusat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Pengembangan  
Sumber Daya Perpustakaan  
  
Drs. Deni Kurniadi, M. Hum  
NIP. 19620909199001 1001

Tembusan:

1. Kepala Perpustakaan Nasional RI;
2. Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sulawesi Tengah .

Lampiran surat nomor 183/2/PPM.00.00/1.2021

Kelengkapan Data Desa Penerima Manfaat Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

1. Profil Perpustakaan Desa yang diusulkan berupa:

1	Kelembagaan Perpustakaan	Dasar Hukum
		Struktur organisasi
		Durasi Operasional
2	Koleksi Bahan Perpustakaan dan Layanan Informasi	Koleksi Buku: Kategori, Edisi, Cetak, dan Ebook
		Komputer
		Internet
3	Layanan perpustakaan	Pinjam baca buku / sirkulasi
		Kegiatan untuk masyarakat
		Waktu layanan : Hari dan Jam Buka Layanan
		Keanggotaan
		Kunjungan: Jumlah dan Kategori Pengunjung
4	Sumber Daya Manusia	Pustakawan
		Tenaga teknis non pustakawan
		Kepala perpustakaan
5	Sarana dan Prasarana	Gedung: Lokasi dan Kepemilikan
		Ruang perpustakaan dan Fasilitas Pendukung
		Listrik
		Jaringan telepon dan Internet

2. Pernyataan tertulis Kepala Daerah berupa komitmen dalam:

- 1) Menjalankan kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dengan menjadikan perpustakaan umum sebagai pusat belajar masyarakat dengan melibatkan stakeholder melalui kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Organisasi Perangkat Daerah lainnya, Sektor Swasta, Perguruan Tinggi, Sekolah, dan berbagai pihak lainnya.
- 2) Menjamin keberlanjutan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pasca berakhirnya kegiatan ini oleh Perpustakaan Nasional RI.